

BAB II

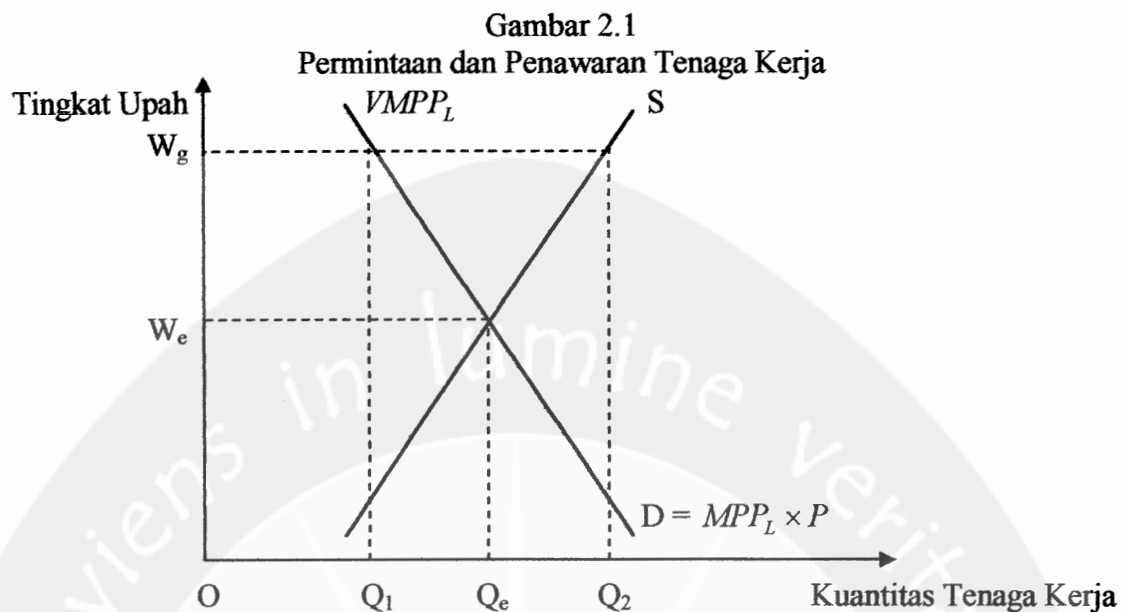
LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat teori-teori yang sesuai dan berkaitan dengan topik penelitian sehingga dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Sesuai dengan pengertiannya, dalam bab ini teori-teori yang termuat di dalamnya merupakan penelaahan yang bertujuan untuk menyusun sebuah kerangka teoritis yang menuntun kedalam sebuah kerangka berpikir yang sistematis. Landasan teori memuat teori tingkat upah dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, teori pengangguran, teori inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya upah dengan pendekatan *Phillips Curve* yang telah memasukan *expectation* (harapan) dengan tujuan mengantisipasi kejadian akan datang dalam mempengaruhi perilaku ekonomi, dan berbagai hasil studi empiris dari penelitian sebelumnya.

2.1. Tingkat Upah

Upah merupakan balas jasa bagi tenaga kerja atas jasa produktifnya sebagai salah satu faktor produksi dalam suatu proses produksi (Sagir, 1983:172). Upah sebagai sumber penghasilan bagi seorang tenaga kerja, merupakan alat atau sarana untuk dapat memenuhi serta menikmati kebutuhan hidupnya dengan layak. Seperti yang telah dijamin dalam undang-undang dasar 1945, pasal 27 ayat 2 : “Tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Besarnya upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja tergantung dari harga tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja (Christopher Pass & Bryan Lowes, 1994:686).



Dalam Gambar 2.1, kurva permintaan (D) tenaga kerja bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan suatu penurunan dalam produktivitas tenaga kerja marginal pada saat tenaga kerja yang digunakan bertambah. Posisi dan kemiringan dari kurva permintaan untuk suatu jenis tenaga kerja tertentu akan tergantung pada produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Simanjuntak 1998:127):

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P$$

di mana:

W = *Wage rate* (Tingkat Upah), atau harga yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja,

$VMPP_L$ = *Value of Marginal Physical Product of Labour* (nilai pertambahan hasil marjinal pekerja atau karyawan),

MPP_L = *Marginal Physical Product of Labour* (Pertambahan hasil marjinal pekerja), atau besarnya perubahan pada total produksi apabila ada

tambahan satu unit input L (*Labour* atau tenaga kerja), dan

P = Harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang.

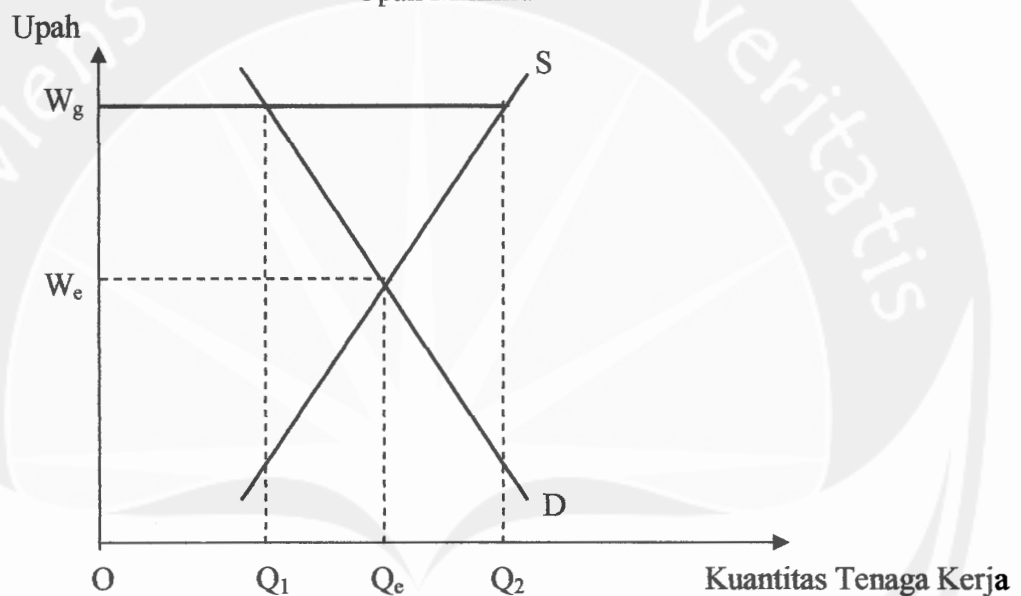
Nilai pertambahan hasil marjinal pekerja ($VMPP_L$), merupakan nilai jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Sebaliknya, upah (W) dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan terhadap jasa yang diberikan dalam aktifitas produksi. Selama nilai pertambahan hasil marginal pekerja lebih besar daripada upah yang dibayarkan ($VMPP_L > W$), pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah pekerja. Kurva penawaran (S) untuk tenaga kerja mempunyai kemiringan yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, berarti semakin tinggi tingkat upah maka semakin besar jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.

2.2. Upah Minimum

Tingkat upah juga dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah, seperti peraturan tingkat upah minimum yang menjamin pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimumnya. Kebutuhan Fisik Minimum dalam arti sempit adalah pemenuhan kebutuhan untuk makanan yang bergizi; sedangkan secara luas berarti pemenuhan akan: pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, kesempatan memperoleh pendidikan, prasarana umum berupa angkutan air bersih dan listrik yang juga disebut sebagai Kebutuhan Dasar Manusia (*human basic needs*) (Sagir, 1983:172). Tingkat upah minimum dapat ditetapkan melalui persetujuan antara serikat dagang dan para pengusaha untuk menjamin bahwa para pekerja dapat menikmati sebagian standar hidup dasar. Penetapan tingkat upah yang terlalu tinggi di atas tingkat keseimbangan (W_e) akibatnya adalah menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja (dari Q_e ke Q_1),

karena walaupun bagi mereka yang masih tetap bekerja (OQ_1) menjadi lebih baik, akan tetapi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari meningkatnya upah (Q_1Q_e) akan menjadi lebih buruk keadaannya. Kebijakan penetapan harga terendah (*floor Price*) pada W_g akan menimbulkan konsekuensi kelebihan penawaran tenaga kerja yang harus ditanggung pemerintah sebanyak Q_1Q_2 (Joesron, 2003:30).

Gambar 2.2
Upah Minimum

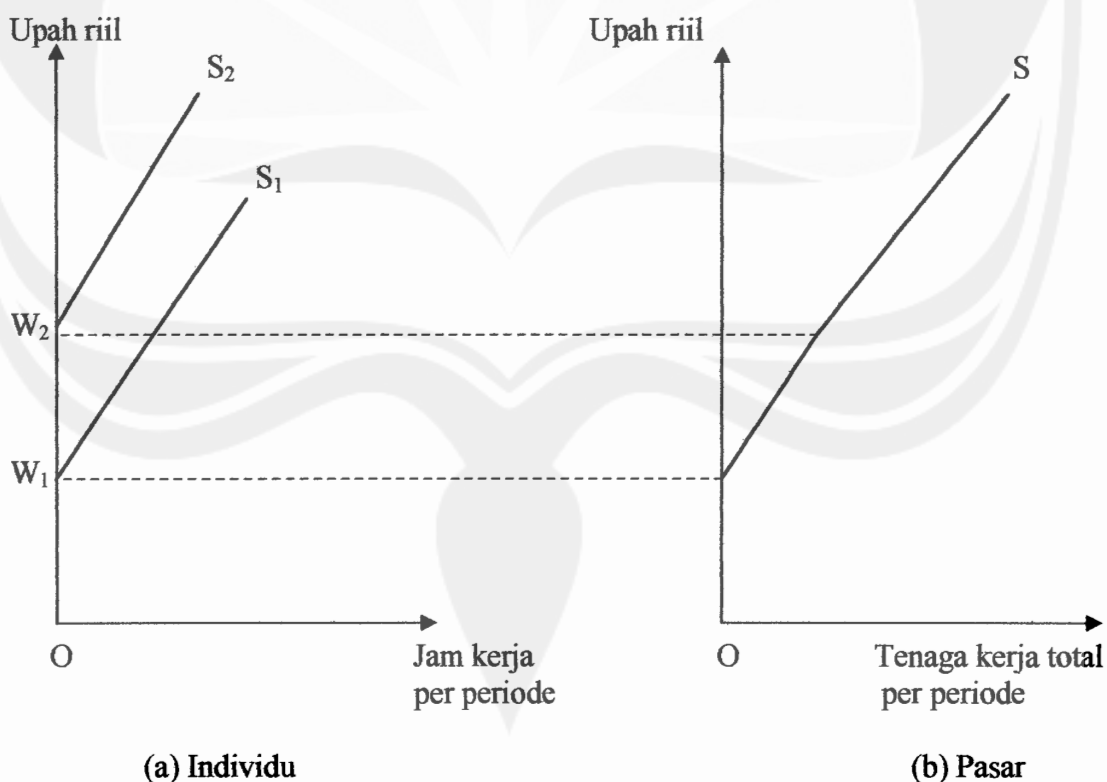


Sebagian besar kasus jika diasumsikan efek substitusi perubahan upah melebihi pendapatannya, kurva penawaran tenaga kerja individu akan mempunyai slope positif yang dapat dijelaskan melalui kurva penawaran pasar untuk tenaga kerja dengan menjumlahkan kurva-kurva penawaran individu. Prosedur ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat upah, semakin banyak pula orang yang terdorong untuk mengambil bagian dalam angkatan kerja. Peningkatan upah akan memikat banyak orang yang sebelumnya menganggur untuk bekerja (lihat gambar 2.3). Untuk tingkat upah riil di bawah W_1 , tidak seorangpun yang bersedia bekerja di pasar tenaga kerja. Konsekuensinya, kurva penawaran pasar untuk tenaga kerja memperlihatkan bahwa

tidak ada tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah riil di bawah W_1 . Tingkat upah di atas W_1 menyebabkan orang pertama memasuki pasar tenaga kerja (S_1). Sepanjang tingkat upah berada di bawah W_2 , orang kedua tidak akan bekerja. Hanya pada tingkat upah di atas W_2 kedua orang memutuskan untuk bekerja.

Peningkatan upah minimum yang tinggi secara riil akan menaikkan penawaran tenaga kerja karena dua alasan. Pertama, upah riil yang lebih tinggi akan menyebabkan setiap orang bekerja lebih lama. Kedua, upah yang lebih tinggi akan mendorong lebih banyak orang (misalnya, orang 2) untuk memasuki pasar tenaga kerja (Nicholson, 2002:504).

Gambar 2.3
Pembentukan Kurva Penawaran Pasar Untuk Tenaga Kerja



2.3. Pengangguran

Pengangguran merupakan sumber daya tenaga kerja yang tidak digunakan secara penuh dari semua sumber daya manusia yang tersedia. Dalam prakteknya, pemakaian seluruh tenaga kerja tidak mungkin dapat tercapai. Selalu ada pengangguran yang tidak dapat dihindari akibat keahlian yang tidak sesuai serta informasi pasar tenaga kerja yang tidak sempurna. Sehubungan dengan itu, interpretasi yang lebih realistis dari kesempatan kerja penuh adalah: kesempatan kerja penuh dicapai apabila jumlah pengangguran yang terdaftar sama dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Ada beberapa sebab dari pengangguran yang secara garis besar dapat dibagi dalam tiga jenis (Christopher Pass and Bryan Lowes, 1994:667):

1. Pengangguran yang disebabkan oleh permintaan (musiman), yaitu adanya pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. Perubahan musim mengakibatkan penghapusan pekerjaan-pekerjaan. Sebagai contoh, hilangnya pekerjaan dalam industri pariwisata selama musim hujan.
2. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dalam pola permintaan (struktural), yaitu pengangguran yang timbul karena penurunan dalam permintaan output. Sebagai contoh: Jika terjadi penurunan permintaan hasil output yang diunggulkan oleh suatu daerah akan menyebabkan menurunnya permintaan output para pemasok lokal, sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan. Tenaga kerja akan dikurangi untuk menjaga kelangsungan usaha.
3. Pengangguran sisi penawaran (atau yang disebut "alami") meliputi beberapa jenis.

- 1) Pengangguran Teknologi, di mana terjadi kehilangan pekerjaan

disebabkan oleh pengenalan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas, sehingga menurunkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah produk tertentu atau mengakibatkan hilangnya pekerjaan dengan keahlian kerja tertentu.

- 2) Pengangguran Pergeseran, yaitu pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya proses perpindahan manusia dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Jumlah serta lamanya pengangguran tergantung apakah pekerja mempunyai keahlian yang layak untuk pekerjaan-pekerjaan yang tersedia.
- 3) Pengangguran di luar kemauan, yaitu pengangguran yang terjadi akibat ketidakmampuannya sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan. Misalnya karena cacat fisik, ada hambatan dalam mencari lapangan pekerjaan atau diterima untuk bekerja.
- 4) Pengangguran Sukarela, pengangguran yang terjadi karena kurangnya tanggung jawab untuk bekerja.
- 5) Pengangguran upah riil, terjadi apabila tingkat upah riil terlalu tinggi, sehingga para pekerja menetapkan harga yang terlalu tinggi atas jasanya, sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 2.2. Jika upah ditetapkan di W_g , bukan di W_e (sebagai akibat dari pengaturan upah minimum) maka pengangguran yang timbul adalah sama dengan Q_1Q_2 .

2.4. Inflasi

Suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Kenaikan harga dapat berupa

peningkatan yang kecil/ringan (*Creeping Inflation*) atau tinggi dan meningkat dengan cepat (*Hyperinflation*).

Ada empat macam kriteria inflasi berdasarkan laju inflasi yang terjadi dalam setahun (Sinungan, 1989:51);

1. Inflasi ringan, yaitu peningkatan laju inflasi di bawah 10% dalam setahun.
2. Inflasi sedang, yaitu peningkatan laju inflasi yang berkisar antara 10% - 30% setahun
3. Inflasi berat, yaitu peningkatan laju inflasi antara 30% - 100% setahun.
4. *Hyperinflation*, yaitu peningkatan laju inflasi diatas 100% setahun.

Inflasi ringan biasanya mempunyai pengaruh negatif yang kecil dalam perekonomian, *hyperinflation* menggambarkan situasi dimana masyarakat mulai kehilangan kepercayaan dalam pemakaian uang untuk tujuan alat tukar. Fenomena tersebut jarang terjadi. Sebagai contoh, pencetakan uang yang berlebihan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (untuk perang) atau menghilangnya barang dan jasa dibarengi dengan permintaan yang sangat tinggi pada keadaan atau situasi sehabis perang.

Inflasi atas dasar penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 macam inflasi (Boediono, 1994:162):

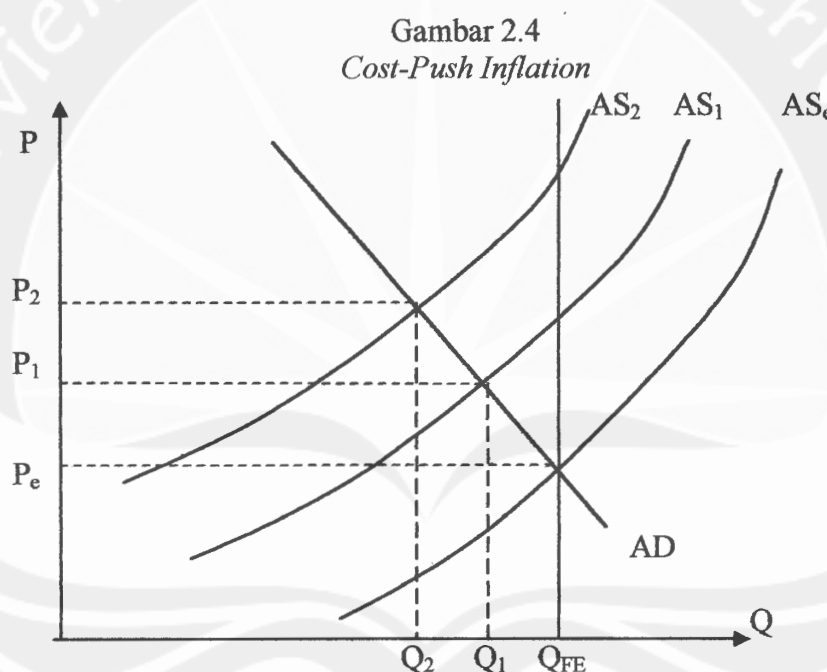
1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation/demand-pull inflation*.
2. Inlasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi, biasa disebut *cost inflation/cost-push inflation*.

2.5. Cost-push Inflation

Cost-push inflation merupakan suatu peningkatan harga-harga secara umum yang diakibatkan oleh meningkatnya biaya faktor input (Christopher Pass and Bryan Lowes, 1994:122). Inflasi karena biaya cenderung berkaitan dengan upah, di mana tingkat upah yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan tingkat pertumbuhan produktivitas. Peningkatan upah sebagai akibat dari tujuan kebijakan ekonomi yaitu pencapaian kesempatan kerja penuh akan mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi secara terus menerus disebabkan oleh interaksi kenaikan harga barang dengan kenaikan biaya input. Karena kenaikan upah, produsen akan berusaha mengatasinya dengan menaikkan harga output untuk mempertahankan margin keuntungan. Peningkatan harga kemudian menghasilkan permintaan upah yang lebih tinggi oleh tenaga kerja untuk melindungi standar hidup anggotanya. Apabila berhasil, peningkatan biaya yang tinggi mendorong produsen menaikkan harga sekali lagi. Harga yang lebih tinggi hanya meningkatkan upah lebih lanjut. Kenaikan harga yang disebabkan oleh biaya cenderung akan menguat oleh harapan kenaikan harga yang lebih tinggi.

Dalam teori pasar buruh, perubahan ini digambarkan dengan pergeseran kurva penawaran tenaga kerja ke kiri, sedangkan posisi kurva permintaan tenaga kerja yang berasal dari pengusaha tidak berubah. Akibatnya terjadi kelebihan permintaan terhadap tenaga kerja yang selanjutnya melalui mekanisme pasar mengakibatkan nilai gaji nominal meningkat. Sesuai dengan prinsip maksimalisasi keuntungan, kenaikan gaji/upah nominal mengakibatkan permintaan terhadap tenaga kerja berkurang (Tambunan, 1996:116).

Lihat Gambar 2.4, bermula pada harga P_e dan Q_{FE} . Kenaikan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga bahan baku untuk industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS_e menjadi AS_1 . Konsekuensinya harga naik menjadi P_1 dan produksi turun menjadi Q_1 . Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS_2 , harga naik dan produksi turun menjadi Q_2 . Dengan kata lain kenaikan biaya produksi (upah) yang tinggi hanya menaikkan harga dan turunnya produksi.

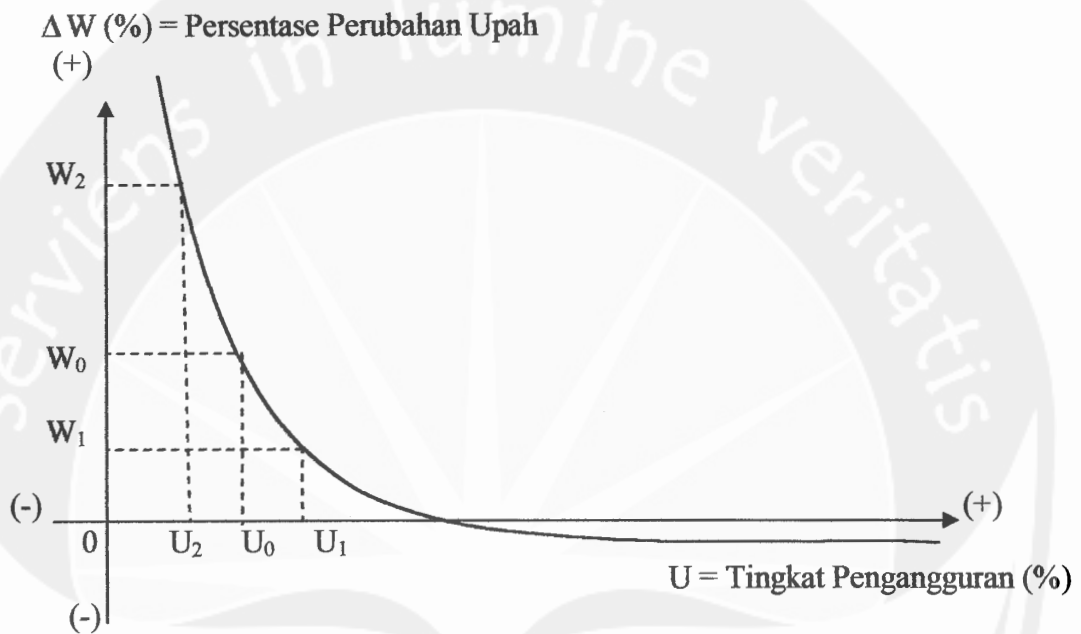


2.6. Kurva Phillips

A. W. Phillips memperkenalkan hasil studi lapangan pada tahun 1958, tentang hubungan antara kenaikan tingkat upah dengan pengangguran yang terjadi di Inggris pada tahun 1861 – 1957. Dari hasil studi diperoleh hubungan negatif antara persentase kenaikan upah dengan pengangguran. Secara grafik, hubungan tersebut tercermin seperti pada Gambar 2.5. Jika persentase tingkat pengangguran meningkat dari U_0 ke U_1 , persentase perubahan upah akan menurun dari W_0 ke W_1 . Apabila persentase

tingkat pengangguran mengalami penurunan dari U_1 ke U_2 maka persentase perubahan upah akan meningkat dari W_1 ke W_2 . Kurva yang menunjukkan adanya hubungan negatif ini sering disebut kurva Phillips (Nopirin, 1982:36).

Gambar 2.5
Hubungan Antara Persentase kenaikan Upah Dengan Pengangguran



Keterangan; (+) : menunjukkan peningkatan persentase perubahan.
(-) : menunjukkan penurunan persentase perubahan.

Teori hubungan negatif ini kemudian dipopulerkan Paul Samuelson dan Robert Solow di Amerika Serikat. Mereka memperoleh hubungan negatif antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran. Jika inflasi meningkat pengangguran akan menurun, sebaliknya jika inflasi menurun pengangguran akan meningkat.

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan oleh ahli-ahli ekonomi untuk menggambarkan terjadinya inflasi di suatu negara; diantaranya adalah Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (GDP deflator), atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Bila dimaksudkan

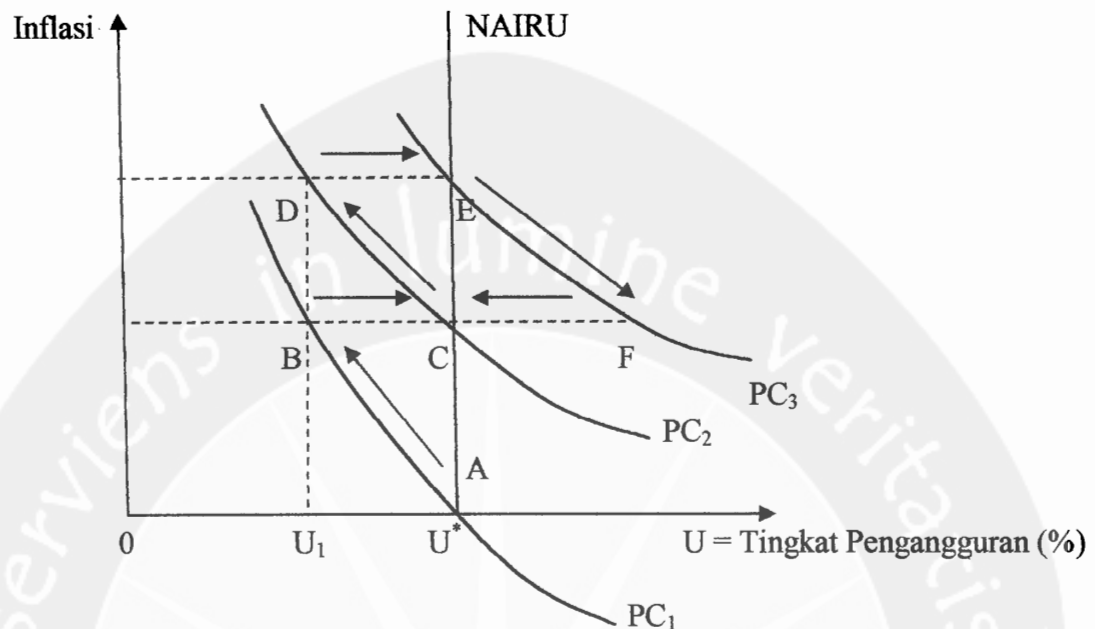
untuk menetapkan upah riil, lebih tepat digunakan Indeks Biaya Hidup atau Indeks Harga Konsumen (Gunawan, 1991:36). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus (Nopirin, 1982:25). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Dengan kata lain terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu.

2.7. *Expectations-Adjusted/Augmented Phillips Curve*

Kenaikan harga-harga menyebabkan *expectation-adjust* (ekspektasi yang disesuaikan) bagi pihak Tenaga Kerja. *Expectation-adjust* merupakan suatu formulasi ulang dari *Phillips Curve* yang memasukan *expectation* harga pada peningkatan upah. Harapan diwujudkan dalam antisipasi dari kejadian yang akan datang yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan kata lain, harapan yang disesuaikan merupakan kecenderungan yang mendasari terjadinya inflasi. Pengertian ini memiliki beberapa istilah seperti inflasi inti, inflasi harapan (*expectational*), inflasi lamban (*inertial*) dan tingkat inflasi yang mendasari inflasi (*undelying rate of inflation*) (Lipsey, 1991:271).

Dalam kurva Phillips harapan yang disesuaikan (lihat Gambar 2.6). U^* adalah tingkat "normal" dari pengangguran yang tidak menyebabkan percepatan kenaikan inflasi (*Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU*). Jika dalam kurva Phillips harapan yang disesuaikan, pemerintah berusaha menurunkan tingkat pengangguran di bawah NAIRU, misalkan pada titik U_1 , inflasi akan meningkat dari titik A ke titik B pada kurva Phillips PC_1 .

Gambar 2.6
Harapan Yang disesuaikan/Kurva Phillips yang ditambahkan

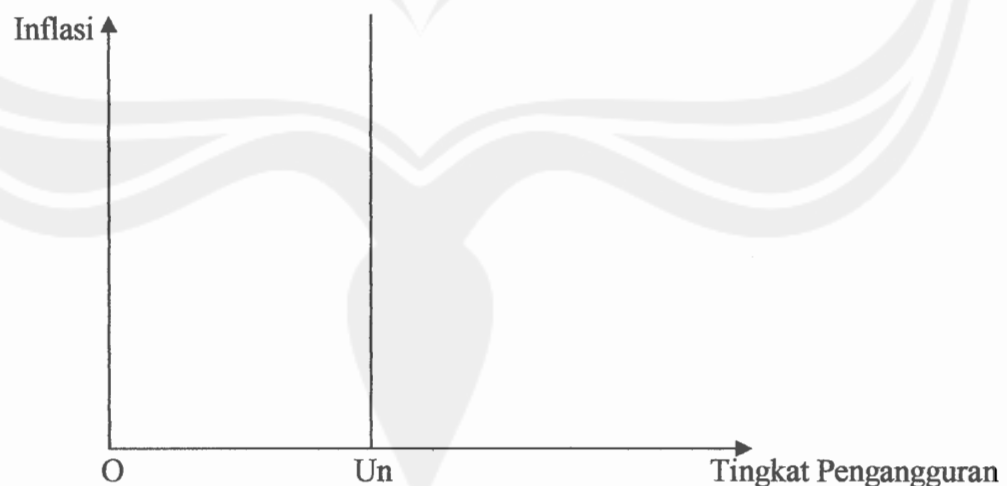


Asumsikan bahwa peningkatan upah melebihi pertumbuhan output per orang maka tingkat pengangguran kembali ke tingkat normal (titik C) dengan kurva Phillips yang baru (PC_2) yang didasari oleh tingkat harapan inflasi yang lebih tinggi. Jika pemerintah sekali lagi berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran pada titik U_1 , hal ini akan menghasilkan percepatan tingkat inflasi ke titik D, dan sekali lagi tingkat upah yang lebih tinggi akan mengakibatkan tingkat pengangguran kembali ke tingkat NAIRU (titik E) dengan kurva Phillips yang baru (PC_3) yang didasari oleh eksepektasi tingkat inflasi yang lebih tinggi lagi. Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mendorong tingkat pengangguran di atas tingkat NAIRU secara sementara dari titik E ke titik F pada kurva Phillips (PC_3) sehingga menurunkan harapan masyarakat tentang tingkat harapan inflasi (Christopher Pass and Bryan Lowes, 1994:278). Dengan menurunnya tingkat upah, pengangguran kembali ke tingkat semula pada titik C.

2.8. Kurva Phillips Jangka Panjang

Kurva phillips jangka panjang mempunyai mekanisme *self-correcting* dalam perekonomian yang bertumpu pada fleksibilitas upah dan harga. Mekanisme ini pada akhirnya memulihkan perekonomian ke tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan demikian, dalam jangka panjang para pembuat kebijaksanaan tidak dapat menentukan suatu tingkat pengangguran alternatif. Hanya ada satu tingkat pengangguran yang konsisten dengan ekuilibrium jangka panjang pada penggunaan tenaga penuh. Artinya kurva phillips jangka panjang berbentuk garis vertikal seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.7. Kurva phillips yang vertikal menunjukkan tingkat pengangguran yang sama, dan ke tingkat inilah perekonomian cenderung akan kembali. Tingkat pengangguran ini biasanya disebut tingkat pengangguran natural (Goldfeld and Chandler, 1990:420).

Gambar 2.7
Kurva Phillips Jangka Panjang



2.9. Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya memuat berbagai hasil studi empiris penelitian-penelitian yang telah dilakukan berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang telah dilakukan antara lain oleh Setiaji (2001), Kuncoro dan Artiani (1998) serta Lucas and Rapping (1969).

Setiaji (2001) melakukan penelitian di Indonesia dengan memperlihatkan hubungan antara persentase perubahan upah nominal harian sektor industri, dengan tingkat inflasi (satu tahun lalu), tingkat pengangguran, dan perbedaan antara tingkat pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja. Tahun observasinya berupa data *cross section*, yaitu tahun 1970, 1985, 1992, dan 1994. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap persentase perubahan upah tetapi tidak begitu nyata sejalan dengan dugaan melemahnya upah pada keadaan eksekutif (Setiaji, 2001:78). Setiaji menemukan bahwa, apabila terjadi kenaikan produktivitas tahun lalu melebihi kenaikan upah riil tahun lalu, maka upah tahun ini diprediksi meningkat.

Kuncoro dan Artiani (1998) secara khusus meneliti kelayakan kebijaksanaan pemerintah pada sektor industri pengolahan dengan mencoba menerapkan konsep ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) untuk mengevaluasi kelayakan kebijaksanaan pemerintah dalam menaikkan Upah Minimum Regional sebesar 15% pada sektor industri tekstil di D.I.Yogyakarta tahun 1982 – 1995. Hasil studi dengan menggunakan metode OLS berkendala linier memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek, kebijaksanaan tersebut tidak diberlakukan. Namun apabila dilihat dari kepentingan jangka panjang, kebijaksanaan pemerintah tersebut tetap layak dipertahankan (Kuncoro dan Artiani, 1998:40).

Lucas dan Rapping (1969) menganalisa kurva Phillips di Amerika, pada tahun 1904 – 1965 dengan menggunakan metode ekspektasi. Lucas dan Rapping menemukan inflasi yang terus menerus atau berkepanjangan tidak akan memberikan

kontribusi pada rendahnya pengangguran tetapi hanya merupakan fenomena jangka pendek (Lucas and Rapping, 1969:348).

